**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonnomi Luas Dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Asshaddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsiladasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Ed. 2, Cet. 3, Jakarta, 2016

 , *Pormat Kelembagaan Negara Dan Pegeseran kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Pers, Yokyakarta

 , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Sekretariat Jendral Dan kepanitraan Makamah Kontitusi RI, Jakarta, Cet. Pertama, 2006.

Chaidir, Ellydar. *Hukum Dan Tiori Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2005.

Huda, Ni’matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015

 Kaloh J, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar grafika, jakarta, 2009.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan X, Nusa Media,Bandung,2016,

Manan, Bagir. *Menyonsong Pajar Otonomi Daerah*, Cet Ke 4, Pustaka Pajar Offset, Yogyakarta, 2015.

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan ke-3, Liberty, Yogyakarta, 2002

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad dalam, Salim HS dan Erlies Septiana Erbani, *Penerapan Tiori Hukum Pada penelitian proposal skripsi dan di sertai*, Raja Grafindo Persada, 2013

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan hak asasi Manusia*, Cet Ke 4, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Radjab Dasril, *Huku Tata Negara Indonesia,* Cat. Ke 2, Rineka Cipta, Jakarta,2005.

Rasyid Riyaas, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Administrasi Di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

Saleh, Imam Ashori. *Konsep Pengawasan Kehakiman.* Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014.

Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara, Erlangga*, Jakarta, 2014,

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, 2014

Yusuf, M. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Catatan Satu, Yogyakarta, 2013.

1. **Jurnal**

Catur Wido Haruni,”Analisis Yuridis Kedudukan Dan Hubungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketata Negaraan Di Indonesia”,Humaniry, Volume 1 No, 2, Septembaer,2006.

Leny M.L. Sipangkar,”Penguatan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function Of Regional Refresentative Council)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume, 13 No, 03, September,2016.

 Salmon E.M. Nirahua, Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Nomor, 4 Volume, 2011.

Yulia Neta, Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum Nomor, 5 Volume, 2011.

Firman Manan, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan,*Nomor, 1 Volume, 2015.

Suryo Pratolo, *Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik,* Nomor, 1 Volume 12, 2011.

Adissya Mega Cristia, *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal*, Nomor 1, Volume 15, 2019.

M. Solly Lubis, 2008, *hukum tatanegara,* CV. Mandar Maju, Bandung.

Mulyadi Golap, *Eksetensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Ketata Negaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jurnal Noken 2

Masnur Murzuki, *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya,* Jurnal, Nomor , 1 Volume, 15, 2008.

TubagusMuhammad Nasarudin, *Peran DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketata Negaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amademen),* Jurnal, Volume 10, 2016.

Muhammad Reza Winata, *Respon Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik,* Jurnal ,Volume 16, Nomor 6.

Adventus Toding, *DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia Wancana Pemusnahan Versus Penguatan,* Jurnal, Nomor, 37 , 2017.

1. **Internet**

Digilib,unila.ac.id, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2020, Pukul 17.25 , WIB, Diakses Pada Tnggal 9 Maret 2020, Pukul 17.10 WIB

1. **Peratutan Perundang-Undangan**

……….*Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

……….*Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat perubahan kedua.*

……….*Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat perubahan ke empat*.